



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DONO NUGROHO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS KECAMATAN**
3. NHK : **766046**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.958.250.000

1. Tanah Seluas 510 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 181 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 325 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 59 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 155 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 42 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 385.250.000
7. Tanah Seluas 98 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 198.000.000
8. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.375.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 335.300.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.800.000



2. MOTOR, HONDA/VARIO MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
8.500.000

3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.
320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 28.550.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 275.014.004

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.597.114.004

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.597.114.004

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.